

Koalisi lintas resi



ROHMAD HADIWIJOYO
Dalang & CEO RMI Group

Gonjang-ganjing. Mungkin itulah kata yang pas untuk mendefinisikan jilid kedua kepresidenan SBY. Belum selesai satu kasus, muncul kasus berikut yang lebih mengguncang. Belum tuntas satu masalah, lahir masalah baru yang lebih menggegerkan. Semuanya berujung pada kisruh politik yang riuh dan hiruk pikuk. Sungguh sayang, energi dan konsentrasi terserap habis oleh politik. Adakah jalan keluar untuk memutus rantai problem tak berkesudahan ini? Mari kita sejenak berkaca.

Kocap kacarita. Setelah era Pandawa, negeri Hastina dipimpin oleh Prabu Parikesit, cucu Arjuna. Tidak mudah untuk memerintah negeri sebesar itu. Di samping rentang wilayah yang luas, kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum stabil akibat krisis pasca perang, berbagai intrik politik membuat situasi makin runyam.

Susah dibedakan mana kawan dan mana lawan. Manuver politik tidak hanya oleh mereka yang jelas-jelas oposan, tetapi bisa juga oleh mereka yang berikrar menjadi bagian pemerintahan.

Untuk mengendalikan masa transisi itu, Parikesit mengedepankan prinsip ambeg paramarta. Menentukan prioritas dan menetapkan tindakan yang dibutuhkan.

Ia bertindak lugas dan tegas terhadap perlawanan yang bertendensi makar. Tidak ada basa-basi dan kompromi, tidak perlu wacana dan perang kata-kata. Musuh yang masuk kategori ini adalah Prabu Nila Kawaca dari Hima-Himantaka, anak Niwata Kawaca yang tewas di tangan Arjuna. Nila hendak membalas dendam sekaligus menaklukkan Hastina.

Parikesit memerintahkan pengerahan kekuatan militer penuh. Pasukan dipimpin langsung Mahapatih Dwara, dengan dukungan pasukan udara Sasi Kirana -anak Gatotkaca- dan pasukan darat yang dipimpin Danurwenda dan Sanga-Sanga.

Identifikasi masalah yang cepat, instruksi yang jelas dan tegas, menyebabkan Dwara bisa bertindak tepat. Ia merancang sebuah serangan kilat yang mematikan, sehingga tentara Nila Kawaca bisa ditumpas sebelum masuk Hastina.

Prioritas berikutnya adalah mengatasi perlawanan para elite politik, yaitu para resi atau kaum brahmana. Meskipun secara matematis dukungan politik untuk Parikesit jauh lebih dominan, tetapi mereka tidak bisa dianggap enteng. Sebab kelas menengah yang vokal dan menguasai lalu lintas opini publik ada di belakang mereka. Merah hitam citra Parikesit di hadapan rakyat, ditentukan para penguasa opini itu.

Parikesit telah mengidentifikasi empat resi yang merongrong kekuasaannya. Yakni Sugondo, Praswapati, Suyokesti, dan Sidi Wacana. Mereka marah karena mulai tersisih dari percaturan kekuasaan. Manuver yang mereka lancarkan merupakan upaya mempertahankan pengaruh di pentas politik.

Jika terhadap Nila Kawaca yang dikedepankan adalah pendekatan tegas, tidak

demikian halnya terhadap para resi. Langkah yang keliru bisa menyulut reaksi publik dan kehebohan baru, serta meluasnya basis oposisi. Padahal keempat resi itu bisa menjadi sekutu potensial untuk menopang stabilitas pemerintahan. Membiarkan mereka berada dalam wilayah abu-abu akan mendatangkan mudharat lebih besar.

Negarawan

Sudah menjadi tradisi zaman itu, sowan adalah perlambang iktikad baik untuk menjalin komunikasi dan memperkuat ikatan kemanusiaan. Sowan efektif mencairkan ketegangan dan memecah kebuntuan. Seorang raja bisa murka apabila ada sekutu, kerabat, atau bawahan absen menghadiri pisowanan, karena itu bisa berarti pembangkangan.

Politik sowan inilah yang dikembangkan Parikesit untuk melunakkan sikap para resi. Sebagai raja, Parikesit berhak untuk mendapat pisowanan. Namun, untuk kepentingan yang lebih strategis ia mengabaikan tradisi itu.

Dialah yang berinisiatif sowan kepada para resi. Bukan sekadar basa-basi demi pencitraan diri, dia datang dengan rendah hati, kemauan untuk mendengar dan memahami, dan niat tulus mencari titik temu.

Langkah ini terbukti tepat. Resi Sugondo berhasil diyakinkan untuk kembali memperkuat barisan koalisi. Bahkan ia bersedia diajak menumpas pemberontakan wilayah perbatasan yang dipimpin Kala Sugisrana.

Begitu juga saat Parikesit sowan ke tiga resi lainnya. Mereka sepatutnya untuk mengefektifkan koalisi lintas resi, yang sebenarnya sudah terjalin, tetapi tak terurus karena tersandera oleh kepentingan sempit masing-masing.

Memang ada konsesi politik yang harus dibayar, yaitu memberi mereka tempat di

Bukan sekadar basa-basi demi pencitraan diri, dia datang dengan rendah hati, kemauan untuk mendengar dan memahami serta niat tulus mencari titik temu.

lingkaran kekuasaan. Sebagai perlambang konsesi ini, Parikesit bersedia menikahi putri para resi. Wahyu dan wong ayu memang lazim menjadi legitimasi kekuasaan.

Soliditas koalisi lintas resi inilah yang menopang Hastina. Prabu Parikesit pun bisa memerintah dengan efektif, tanpa gangguan politik yang mengguncang. Tidak ada lagi delegitimasi kekuasaan seperti tuduhan bohong, lamban, tidak tegas, dan sebagainya.

Kunci dari semuanya adalah sikap negarawan para pemimpin. Parikesit datang sebagai negarawan, yang mengabaikan segala tata krama demi kepentingan bangsa dan negara. Para resi sebagai elite politik menunjukkan karakter negarawan, dengan mengeliminasi kepentingan sesaat dan dendam masa lalu, demi kepentingan yang lebih besar.

Sebuah tatanan politik akan berjalan pada rel yang benar dan mendatangkan maslahat, apabila seluruh aktor memiliki jati diri negarawan. Presiden, para pemimpin politik, dan para wakil rakyat haruslah sosok berwatak negarawan.

Sosok yang mau berendah hati untuk menekan ego sepihak dan kepentingan sempit. Tidak bisa hanya presiden yang dituntut bersikap negarawan, sementara elite politik lainnya tidak. Tidak boleh hanya presiden yang diwajibkan berperilaku negarawan, sementara anggota parlemen seandainya memamerkan karakter politisi petualang.



BISNIS/ADI PURDIYANTO